

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi ekonomi berkembang pesat. Dalam pembangunan nasional pembiayaan terdapat dari berbagai sektor, salah satu pembiayaan bersumber dari penerimaan pajak, sehingga pajak merupakan komponen penting penerimaan negara sebagai alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan, untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagai pembuat dan pengatur kebijakan pemerintah sudah memberi kewenangan pada setiap daerah baik Provinsi, Kota dan atupun Kabupaten untuk mengatur dan menciptakan perekonomiannya masing-masing guna menyediakan dan menghidupi dana untuk kegiatan ekonominya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. dimana pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu penyumbangan pendapatan yang banyak didapatkan oleh pendapatan asli daerah yaitu dari pajak.

Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan negara kita yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang masuk dalam kategori Pajak Negara. Sejak tahun 2011 penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor: 213/pmk.07/2010, nomor: 58 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan (Rahman, 2011:41).

Pajak Bumi dan Bangunan memiliki peran yang sangat penting untuk keuangan daerah, maka harus dipungut semaksimal mungkin, artinya maksimal itu adalah jumlah pungutan di akhir masa pungut sama dengan jumlah wajib pajak itu sendiri. Berdasarkan data seluruh wajib pajak yang ada, maka semuanya harus dipungut 100 persen sebagaimana arti dari maksimal, tetapi ada kendala-kendala tertentu dalam hal wajib pajak. Terdapat beberapa kendala dalam pemungutan pajak yaitu mengenai sistem pajak yang rumit, pegawai dan produktivitas pegawai, susunan kantor pemerintahan daerah, menentukan wajib pajak, tarif pajak perlu diubah berkala, penetapan, menagih, dan menegakkan hukum menurut Devas (1989:171). Mempertimbangkan kendala-kendala itu maka pemungutan PBB Perkotaan ini diturunkan dari maksimal menjadi Optimal. Pajak bumi dan bangunan bersifat wajib artinya seluruh wajib pajak harus membayarkan kewajibannya. Sesuai dengan arti optimal yaitu mendapatkan nilai terbaik atau

tertinggi, maka titik optimal atau yang di tetapkan oleh BPPD Kota Bandung jika penerimaan PBB di Kota Bandung telah mencapai persentase 100 persen dari jumlah wajib pajak.

Dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bandung kini semakin mudah dengan adanya layanan inovasi . Namun sejak diterapkan layanan inovasi realisasi Pajak Bumi dan Bangunan selalu mengalami peningkatan. Peneliti mendapatkan data realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang didapat dari Kantor BAPENDA Kota Bandung di Jawa Barat dari tahun 2017 sampai dengan 2021, yaitu:

Tabel 1.1 Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2017	578.500.000.000	502.511.124.172	86,87%
2	2018	700.500.000.000	552.812.400.078	78,92%
3	2019	630.000.000.000	558.242.627.008	88,61%
4	2020	780.000.000.000	505.193.534.229	64,77%
5	2021	700.000.000.000	509.056.381.743	72,72%

Sumber : Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung

Berdasarkan tabel di atas, Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandung Jawa Barat dari tahun 2017 sampai dengan 2021 tidak stabil, yang ditandai ditahun 2017-2018 mengalami penurunan 7,95% kemudian 2018-2019 mengalami kenaikan 9,69% dan 2019-2020 mengalami penurunan 23,84%, sedangkan ditahun 2021 sudah mencapai 7,95% dari data di atas, kenaikan

kepemilikan tanah pribadi setiap tahunnya selalu meningkat, namun masyarakat belum sepenuhnya taat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Upaya kongrit untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban jika laporan keuangan harus dilaporkan secara terbuka dan bagi para pengguna informasi karena laporan keuangan itu merupakan refleksi dari komitmen pemerintah daerah untuk menjalankan mandat dari masyarakat dan mewujudkan good governance di pemerintahan daerah itu sendiri.

Saat ini pihak Pemerintah Kota Bandung telah menerapkan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) tersebut dalam kegiatan laporan keuangannya. Seluruh dinas-dinas dituntut untuk menginput laporan keuangannya. Begitu juga dengan BAPENDA Kota Bandung. Dari hasil pengamatan penulis di Kantor BAPENDA Kota Bandung , saat ini pihak Kantor BAPENDA Kota Bandung juga turut menginformasikan laporan keuangannya melalui aplikasi SIMDA.

Jika melihat tampilan dan tools dari aplikasi tersebut dapat dinyatakan bahwa aplikasi sistem informasi yang disajikan sudah lengkap, sudah adanya

rincian dan ringkasan dari seluruh aktifitas keuangan. Dimana seluruh dinas terkait harus memasukkan seluruh aktifitas keuangannya, baik berupa laporan target realisasi anggaran maupun laporan serapan anggaran yang sudah tercapai harus segera diinput laporannya. Yang menjadi permasalahannya bahwa ketika menggunakan aplikasi SIMDA sering terjadi permasalahan pada server atau jaringan pusat yang menyebabkan aplikasinya menjadi sulit diakses. Oleh karena permasalahan yang terjadi pada aplikasi tersebut tentunya mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang menyebabkan sering terjadinya keterlambatan dalam input data aktifitas laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang disajikan belum akurat secara maksimal.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan belum berjalan dengan baik, salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan tersebut yaitu sering terjadi keterlambatan dalam penyerahan laporan keuangan dan lemahnya sistem informasi akuntansi. Tidak tepatnya waktu pelaporan aktifitas keuangan maka akan berdampak pada akurasi data yang diperlukan. Fakta dilapangan tersebut menunjukkan bahwa informasi keuangan yang disajikan belum memenuhi unsur kriteria sistem informasi akuntansi yang tepat waktu dan akurat.

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Menunjang Kualitas Laporan Keuangan Pajak Bumi Dan Bangunan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diteliti, maka peneliti merumuskan masalah ke dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana Sistem Informasi Akuntansi di Bapenda.
2. Bagaimana Kualitas Laporan Keuangan Pajak Bumi Dan Bangunan.
3. Bagaimana Analisis Sistem Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Menunjang Kualitas Laporan Keuangan.
4. Bagaimana Keamanan Pada Sistem Informasi Akuntansi di Bapenda

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data-data dan informasi mengenai sistem informasi akuntansi pajak bumi dan bangunan dalam menunjang kualitas laporan keuangan PBB untuk memperoleh data atau informasi yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis serta memberikan gambaran mengenai Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pajak Bumi Bangunan Dalam Menunjang Kualitas Laporan Keuangan Pajak Bumi Dan Bangunan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui :

1. Bagaimana Sistem Informasi Akuntansi Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Bagaimana kualitas laporan \keuangan Bapenda
3. Bagaimana Analisis Sistem Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Menunjang Kualitas Laporan Keuangan
4. Bagaimana Keamanan Pada Sistem Informasi Akuntansi di Bapenda

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk menjadikan sumber referensi dalam penelitian mengenai sistem informasi akuntansi pajak pajak bumi bangunan dalam menunjang kualitas laporan keuangan PBB pada pajak Indonesia. Serta juga mendapat pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis di bangku perkuliahan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Dalam penulisan ini bertujuan untuk menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan Perekonomian dalam sistem informasi akuntansi Pajak. Terutama dalam menunjang kualitas laporan keuangan di kantor PBB Bandung

2. Bagi Kampus

Dalam penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kembali untuk Progam Studi S1 Akuntansi pada khususnya dan Univertas Koperasi Indonesia pada Umumnya

3. Bagi Penulis Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan terori menegenai Analisis Sistem Informasi PBB dalam menunjang kualitas laporan keuangan , bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.